

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan kas negara yang digunakan membiayai pengeluaran-pengeluaran tugas negara. Pajak yang paling berkontribusi besar untuk kas negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)(Resmi, 2016). Kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 dijelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tarif, batas waktu, hingga denda apabila tidak melakukan kewajibannya(Nurhadi dan Usman, 2018). Pajak Pertambahan Nilai(PPN) merupakan pembebanan nilai tambah atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikenakan nilai 10% dari nilai transaksi(Bala et al., 2018).

PT Duta Karya Bersatu merupakan perusahaan jasa *outsourcing* yang bergerak dibidang tenaga ahli (*climbing* atau *gondola*, *lifeguard*, *gardener*, *security*) dan *cleaning service*.PT Duta Karya Bersatu belum memiliki omset Rp.4.800.000.000, per bulan tetapi memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP), sehingga memiliki kewajiban memungut PPN atas transaksi penyerahan jasa yang di berikan Setelah PT Duta Karya Bersatu dikukuhkan menjadi PKP maka wajib melaksanakan perpajakan PPN-nya mulai dari perhitungan PPN, penyetoran PPN sampai pelaporan PPN harus sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

PT Duta Karya Bersatu melakukan perhitungan pengenaan PPN dengan cara mengalikan total biaya dan jasa sebagai dasar pengenaan pajak (DPP) dikali 10% yang hasilnya adalah PPN terutang. Perhitungan PPN ada di dalam setiap surat tagihan yang dikirimkan perusahaan kepada klien tiap akhir bulan atas penyerahan jasa yang diberikan. Setelah tagihan diberikan kepada klien selanjutnya manajemen PT Duta Karya Bersatu akan mencatat tagihan di jurnal penagihan yaitu mendebit piutang jasa dan mengkredit hutang pajak PPN dan pendapatan, contoh jurnal penagihan dapat dilihat pada tabel 1.1 :

Tabel 1. 1 Jurnal Penagihan

Akun	Debit	Kredit
Piutang Jasa	xxx	
Hutang Pajak PPN		xxx
Pendapatan		xxx

Sumber Data : PT Duta Karya Bersatu

Setelah klien dikirimkan surat tagihan maka klien di beri jangka waktu 15 hari untuk melunasi tagihannya dan jika klien melunasi tagihannya maka manajemen PT Duta Karya Bersatu akan menjurnal di jurnal pelunasan yaitu mendebit R/K bank mandiri dan mengkredit uang muka pajak PPh 23 dan piutang jasa, contoh jurnal pelunasan dapat dilihat pada tabel 1.2 :

Tabel 1. 2 Jurnal Pelunasan

Akun	Debit	Kredit
R/K Bank Mandiri	xxx	
Uang Muka Pajak PPh 23		xxx
Piutang Jasa		xxx

Sumber Data : PT Duta Karya Bersatu

Ketika pelunasan PT Duta Karya Bersatu akan mengkredit PPh 23 karena ada beberapa klien yang akan memotong PPh 23 yang dasar pemotongannya dari

DPP atas penyerahan jasa yang dilakukan PT Duta Karya Bersatu sehingga pada saat pelunasan PT Duta Karya Bersatu Menerima pembayaran dari klien tidak sesuai kontrak karena telah terpotong PPh 23 oleh klien.

Selanjutnya adalah penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPN di mana PT Duta Karya Bersatu untuk melakukan penyeteroran pembayaran pajak PPN masa tiap bulan menunggu pelunasan pembayaran dari klien. Pelunasan dari klien sangat berpengaruh terhadap *cash flow* perusahaan, sehingga ketika klien tidak melunasi tagihannya pada bulan tersebut maka PT Duta Karya Bersatu tidak dapat membayar pajak PPN terutang pada bulan tersebut sampai klien melunasi tagihannya. Contoh kasus pada tagihan bulan Oktober 2021 klien diberi waktu pelunasan sampai tanggal 15 November tetapi klien belum membayar tagihannya hingga akhir bulan November 2021 akhirnya Pajak terutang PPN bulan Oktober baru dapat di bayarkan pada bulan Desember. Dampak dari kasus bulan Oktober tidak menyetor pajak sesuai batas waktu PT Duta Karya Bersatu mendapat Surat Tagihan Pajak (STP) dari DJP Madya Dua Surabaya yang isinya sanksi administrasi berupa denda, dari kasus tersebut PT Duta Karya Bersatu harus mengetahui tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) agar ke depannya terhindar dari sanksi pajak. Dengan mengetahui Ketentuan Umum Perpajakan perusahaan dapat mengelola urusan perpajakannya secara lebih mudah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengambil tugas akhir dengan judul "EVALUASI PENYETORAN DAN PELAPORAN SPT MASA PPN PADA PT DUTA KARYA BERSATU SURABAYA TAHUN 2021".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah mengenai :

1. Bagaimana perhitungan untuk pengenaan pajak PPN PT Duta karya Bersatu (Tahun 2021) sudah sesuai Peraturan Perpajakan ?
2. Bagaimana penyetoran dan pelaporan PPN pada PT Duta Karya Bersatu (Tahun 2021) sudah sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan di capai adalah :

1. Untuk menilai perhitungan pengenaan pajak PPN PT Duta Karya Bersatu jika di tinjau dari Peraturan Perpajakan;
2. Untuk menilai penyetoran dan pelaporan PPN pada PT Duta Karya Bersatu jika di tinjau dari Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (KUP).

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat di ambil dengan adanya penelitian ini, antara lain dapat berguna bagi :

1. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung program pengabdian masyarakat serta dapat menambah data referensi repositori

perpustakaan Univeritas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya dan mahasiswa/i yang memprogram mata kuliah tugas akhir dengan permasalahan terkait topik penulisan tugas akhir ini di masa mendatang.

2. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini, diharapkan membantu pembaca mendapat referensi topik dan menjadi acuan dalam pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai

3. Bagi Perusahaan PT Duta Karya Bersatu

Hasil dari penelitian ini di harapkan menjadi solusi, acuan dan mempermudah dalam penyelesaian masalah PPN di dalam perusahaan.

4. Bagi Peneliti

Sebagai teori Pengembangan yang selama ini diperoleh di perkuliahan bisa meningkatkan serta menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan juga sebagai perbandingan antara teori-teori yang selama ini dipelajari dalam perkuliahan dengan dunia kerja.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dapat menjelaskan mengenai gambaran penelitian, maka dapat di deskripsikan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini memuat sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Di dalam bab ini menjabarkan teori-teori pendukung penelitian dan mendasari.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini terdiri dari sub bab desain penelitian, sub bab batasan penelitian, sub bab metode pengumpulan data dan sub bab teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini berisi sub bab gambaran subjek penelitian, sub bab hasil penelitian dan sub bab pembahasan. Di dalam sub bab gambaran subjek penelitian terdapat sejarah perusahaan, visi-misi, struktur organisasi serta profil usaha perusahaan.

5. BAB V PENUTUP

Di dalam bab ini berisi sub bab simpulan dan saran, sub bab implikasi penelitian. sub bab saran penelitian ditujukan untuk peneliti selanjutnya agar menjadi acuan dan masukan dengan meneliti topik yang sama namun berbeda perusahaan.